

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan hal yang sangat mutlak dan harus dilaksanakan, jika suatu bangsa ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan komplektasi yang tinggi tidak memungkinkan pembangunan dilakukan secara serentak dengan penekanan yang sama pada berbagai bidang (Fitra, 2007:1).

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami dan sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja berarti tidak mempunyai penghasilan. Hilangnya sumber penghasilan membuka peluang penduduk mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang pada akhirnya mampu membawa mereka kedalam jurang kemiskinan. Persoalannya semakin rumit karena semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang mungkin ditimbulkannya, contohnya menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, kemiskinan dan pemborosan yang luar biasa (BPS, 2007).

Setiawan (2013:2) mengatakan bahwa pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang

siap bekerja. Atau dengan kata lain, di dalam pasar tenaga kerja jumlah penawaran akan tenaga kerja yang ada lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah permintaan tenaga kerja.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, ini membuat Indonesia pantas disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusiannya. Hal ini seharusnya dapat memberikan keuntungan untuk perekonomian di Indonesia. Namun faktanya sekarang, banyak warga Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain menjadi pengangguran. Secara ekonomi makro, pengangguran menjadi permasalahan pokok baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut merupakan tabel persentase pengangguran di enam propinsi di pulau Jawa tahun 2012.

Table 1.1
Jumlah Pengangguran Enam Provinsi di Pulau Jawa Bulan Agustus Tahun 2012

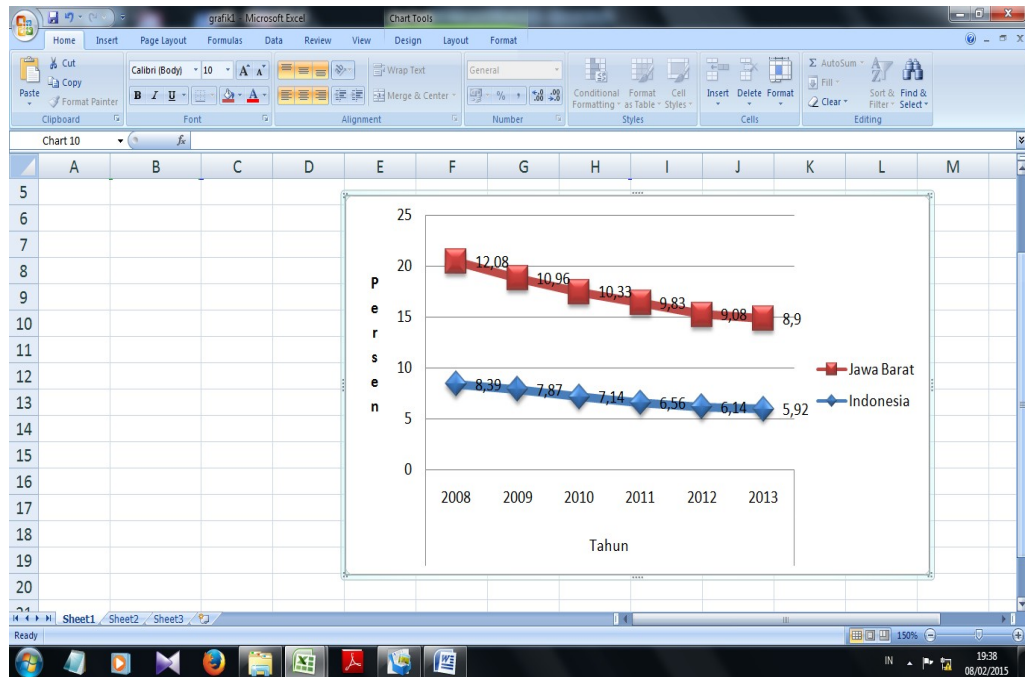
No	Provinsi	Jumlah Pengangguran (ribu)
1	Jawa barat	1,829,0
2	Jawa tengah	962,1
3	Jawa timur	819,6
4	DKI	530,0
5	Banten	519,2
6	DIY	77,2

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, BPS

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2012 propinsi Jawa Barat memiliki jumlah pengangguran paling tinggi diantara 6 provinsi di pulau Jawa, dimana pada tahun 2012 jumlah pengangguran di Jawa Barat sebesar 1.829,0 ribu dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,08 persen, sedangkan provinsi paling sedikit yaitu DIY dengan jumlah pengangguran sebesar 77,2 ribu dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,97 persen.

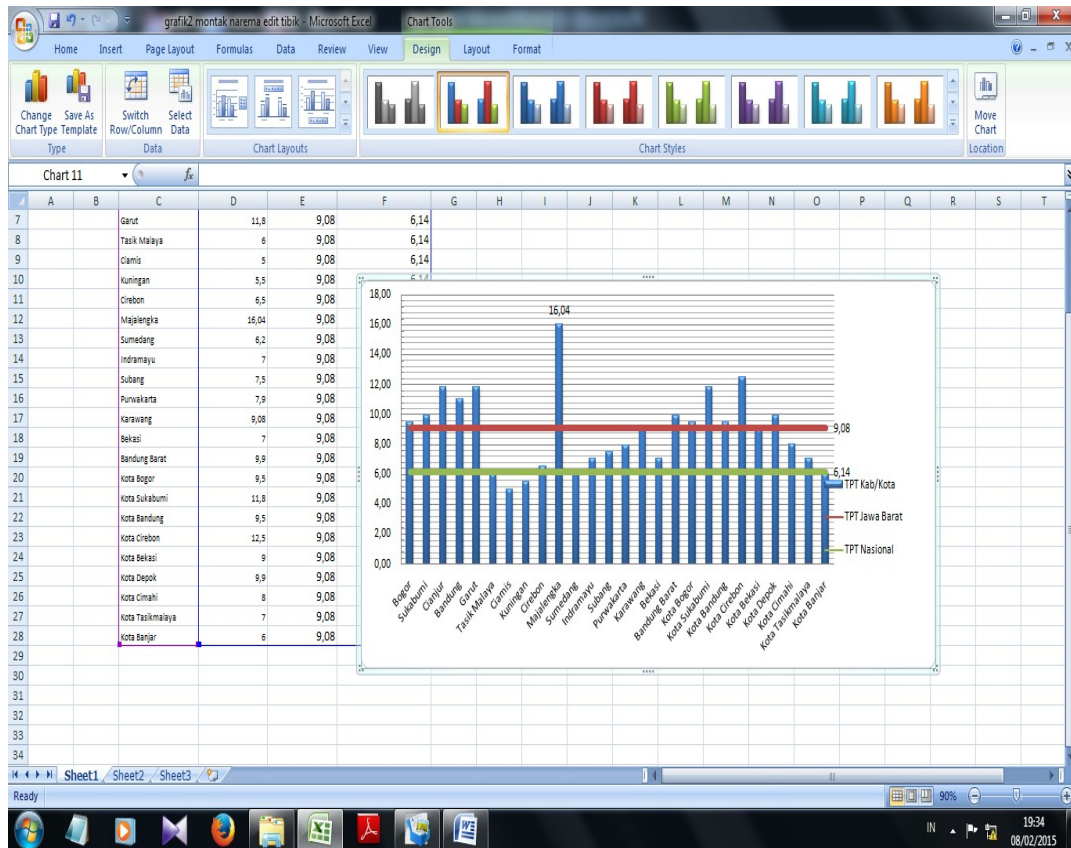
Gambar 1.1

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Terhadap Nasional Tahun 2008-2013



Sumber : Sakernas (Februari), BPS 2013

Gambar 1.2
Perbandingan Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi Dan Nasional Tahun 2012



Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2013

Berdasarkan gambar diatas perkembangan tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa Barat mengalami penurunan tiap tahunnya, akan tetapi meskipun mengalami penurunan tiap tahunnya perkembangan tingkat pengangguran di Jawa barat lebih tinggi dari pada pengangguran di Indonesia.

Pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan

yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur (Samuleson, 2008).

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha untuk mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya bekerja di sektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia untuk menunggu beberapa lama. Tidak menutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di kota, provinsi atau di daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah tersebut. Sebaliknya, angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonominya masih tertumpu pada sektor tradisional, terlebih jika tingkat pendidikan di daerah itu masih rendah (Mudjadrat, 2006).

Provinsi Jawa Barat memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan

ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (trickle down effect).

Pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Tabel 1.2
Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2011

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
1	2007	261,181,705
2	2008	276,649,280
3	2009	290,650,775
4	2010	307,604,325
5	2011	326,767,197

Sumber: BPS Jawa Barat, Tahun 2007-2011

Dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa laju PDRB di Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2007-2011, dimana pada tahun 2007 laju PDRB Jawa Barat sebesar 261,181,705 juta rupiah dan pada tahun 2011 naik sebesar 326,767,197 juta rupiah.

Tabel 1.3
Data Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2011

No	Tahun	jumlah penduduk
1	2007	41,483,729
2	2008	42,194,869
3	2009	42,693,951
4	2010	43,053,732
5	2011	43,826,775

Sumber: BPS Jawa barat, Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012

Dari data diatas jumlah penduduk provinsi Jawa Barat tiap tahunnya mengaami peningkatan, dimana pada tahun 2007 jumlah penduduk di Jawa Barat sebesar 41,483,729 dan pada tahun 2011 naik sebesar 43,826,775.

Indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro,2006). Penduduk yang berpendidikan tamatan SMA (tamatan SMA dan Perguruan tinggi) diasumsikan mempunyai keterampilan dan pengetahuan tinggi, sehingga dapat menyerap teknologi modern dan meningkatkan kapasitas produksi.

Rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat dapat ditunjukan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Jawa Barat Tahun 2007-2011

No	Tahun	Rata-rata lama sekolah
1	2007	7,83
2	2008	7,83
3	2009	8,03
4	2010	8,13
5	2011	7,94

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di provinsi Jawa Barat masih relatif rendah, di bawah asumsi penduduk berpendidikan minimal SMA yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tinggi. Tahun 2009 rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat berkisar 8,03 tahun. tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat berkisar 8,13 tahun. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan siswa di bawah tingkat SMA masih lemah. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal bisa berupa kemampuan ekonomi siswa yang lemah, fasilitas pendidikan yang masih belum memadai, dan tidak meratanya infrastruktur bidang pendidikan yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat.

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Jawa barat 2007-2011.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.** Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2007-2011?
- 2.** Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2007-2011?
- 3.** Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2007-2011?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2007-2011.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2007-2011.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2007-2011.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Menambah masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam merencanakan pembangunan selanjutnya antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat, terutama yang berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian-penelitian berikutnya tentang penurunan tingkat pengangguran di Jawa Barat.